

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulang.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Depok.
- Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2016, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Tindak Pidana PEMILU*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Santoso, Topo, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, Topo dan Hariman Satria, 2023, *Hukum Pidana Pemilu*, Rajawali Pers, Depok.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Suyatno, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.
- Widiarty, Wiwik Sri, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta.
- Zaman, Rambe Kamarul, 2016, *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*, expose, Bandung.

B. JURNAL

Agus, Andi Aco, et al., “*Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik Setelah Pilkada Langsung*”, TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 9, No. 2, Juni 2022.

Asnawi, Asih Gaduh Andriani, dan Ayang Fristia Maulana, “*Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif*”, Yustisia Tirtayasa, Vol. 3, No. 3, Desember 2023, DOI: <https://dx.doi.org/10.51825/yta.v3i3.21939>.

Fatimah, Siti, “*Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu*”, Resolusi: Jurnal Sosial Politik, Vol. 1, No. 1, Juni 2018, DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.154>.

Montol, Atalya Bless, Friend Henry Anis, dan Cevonie Marietje Ngantung, “*Penayangan Film Dirty Vote dalam Masa Tenang Kampanye Pemilihan Umum 2024 Ditinjau dari Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*”, Lex Administratum, Vol. 13, No. 2, Maret 2025, DOI: <https://dx.doi.org/10.51825/yta.v3i3.21939>.

Muammar dan Iqbal Taufik, “*Membedah Tindak Pidana Politik Uang, Suatu Telaah dari Sisi Struktur Norma*”, MATAKAO Corruption Law Review, Vol. 1, No. 2, November 2023, DOI: <https://doi.org/10.47268/matakao.v1i2.11305>.

- Nabilah, Aghniatus Shelly dan Rahmat Muhajir Nugroh, “*Politik Hukum Pengaturan Larangan Politik Uang (Money Politic) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*”, Ahmad Dahlan Legal Perspective, Vol. 4, No. 2, Februari 2024, DOI: <https://doi.org/10.12928/adlp.v4i2.12587>.
- Putri, Harrinda Noviona Aprilita Maharani dan Isna Fitria Agustina, “*Peran Bawaslu dalam Mencegah Praktik Money Politic pada Pemilu di Kota Surabaya*”, Journal of Governance and Local Politics, Vol. 6, No. 1, Mei 2024, DOI: <https://doi.org/10.47650/jglp.v6i1.1057>.
- Raharja, Ida Bagus Mahayoga dan I Ketut Rai Setiabudhi, “*Pengaturan Politik Uang dalam Perspektif Hukum Pidana Pemilihan Umum*”, Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 6, Mei 2020.
- Satria, Hariman, “*Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia*”, Integritas : Jurnal Antikorupsi, Vol. 5, No. 1, Juni 2019, DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>.
- Sugiarto, Anton Hutomo, Ismaya Dwi Agustina, dan Moch. Rijal, “*Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Money Politik pada Pemilu 2019*”, Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1, Juni 2020, DOI: <https://doi.org/10.53027/jp.v4i1.101>.
- Sumodiningrat, Aprilian, “*Menakar Transformasi Bawaslu Menjadi Lembaga Independen Peradilan Pemilukada*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 1, Maret 2022, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1918>.

Usman, Marwan Mas, dan Ruslan Renggong, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Polewali*”, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol. 3, No. 2, Juni 2021, DOI: <https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.637>.

Widiastanto, Ari, et al., “*Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Politik Uang pada Pemilu 2019*”, Jurnal USM LAW REVIEW, Vol. 4, No. 1, Juni 2021, DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3370>.

Wulandari, Ida Ayu Sintya, I Wayan Rideng, dan Luh Putu Suryani, “*Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Pemilu terkait dengan Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali*”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4, No. 3, Desember 2023, DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8060.354-359>.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1915 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / Staatsblad 1915 No. 732.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).

D. LAIN - LAIN

Antikorupsi, Pusat Edukasi, “Waspadai Bahaya Politik Uang, Induk dari Korupsi”, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230217-waspadai-bahaya-politik-uang-induk-dari-korupsi>, diakses 3 November 2024.

Asshiddiqie, Jimly, “Penegakan Hukum. Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 — 2012”, https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/541934/mod_resource/content/1/Penegakan_Hukum.pdf, diakses 3 November 2024.

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan, “Pemungutan Suara”,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pemungutan%20Suara>, diakses 3
November 2024.

Consulting, Saiful Mujani Research and, Potensi Politik Uang di Pemilu 2024,
<https://saifulmujani.com/sebanyak-11-persen-pemilih-rentan-terpengaruh-politik-uang/>, diakses 10 Maret 2025.

Indonesia, Charta Politika, “Survei Nasional Elektabilitas Calon Presiden –
Calon Wakil Presiden Januari 2024”,
<https://www.chartapolitika.com/hasil-rilis-survei-nasional-elektabilitas-calon-presiden-calon-wakil-presiden-januari-2024/>,
diakses 10 Maret 2025.

Indonesia, Indikator Politik, “Basis Demografi dan Perilaku Pemilih”,
<https://indikator.co.id/rilis-exit-poll-pilpres-2024-indikator/>, diakses
10 Maret 2025.

Presiden, Kantor Staf, “KSP: Waspadai Potensi Politik Uang dalam Pemilu
Serentak 2024”, <https://ksp.go.id/ksp-waspadai-potensi-politik-uang-dalam-Pemilu-serentak-2024.html>, diakses 1 Oktober 2024.

Statistik, Badan Pusat, “Indeks Perilaku Anti Korupsi 2024”,
<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/06/66e636bc0a8fa4f90e0d6c6d/indeks-perilaku-anti-korupsi-2024.html>, diakses 10 Maret
2025.

Supriyanto, Didik, “Salah Paham Pemilu 2.2: Pengaturan Sistem, Buku
Ketentuan Umum vs Buku Pelaksanaan Pemilu”,

<https://rumahPemilu.org/salah-paham-Pemilu-2-2-pengaturan-sistem-buku-ketentuan-umum-vs-buku-pelaksanaan-Pemilu/>, diakses 1 April 2025.

Surabaya, Badan Pusat Statistik, “Berita Resmi Statistik No. 10/08/3578/Th. VII, 7 Agustus 2024”, <https://surabayakota.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/29/337/persen-tase-penduduk-miskin-maret-2024-sebesar-3-96-persen.html>, diakses 10 Maret 2025.

Surabaya, Badan Pusat Statistik, “Kota Surabaya Dalam Angka 2025” <https://surabayakota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/bd1f25e59ae790cc8a7c0c07/kota-surabaya-dalam-angka-2025.html>, diakses 10 Maret 2025.

Surabaya, Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi Universitas Muhammadiyah, “Tingkat Permisifitas Politik Uang dan Membaca Pola Klientelisme di Jatim Menjelang Pilkada 2024”, <https://www.um-surabaya.ac.id/news/survei-pusad-umsurabaya-54-8-masyarakat-jatim-menerima-uang-tapi-tidak-memilih-calon-yang-memberi>, diakses 10 Maret 2025.